



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat umum
Dengan	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jawa Tengah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 September 2024
Waktu	: 13.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Menerima Pengaduan dan memberikan masukan terkait Permasalahan yang Dihadapi oleh TKSK Prov. Jawa Tengah
Ketua Rapat	: Wastam, S.E., S.H.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 1 Pimpinan Komisi VIII DPR RI; 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI; 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

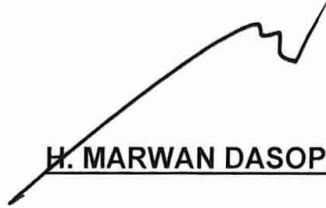
Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Jawa Tengah dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengusulkan program bantuan sosial dikonversi menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab apabila anggaran bantuan sosial akan habis dibagikan sementara anggaran pemberdayaan masyarakat dapat terus diputar dan dilanjutkan oleh penerima manfaat berikutnya.
2. Juru bicara TKSK se-Jawa Tengah Suparjo mengatakan bahwa mereka berasal dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Batang, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, dan Kebumen.
3. Para TKSK se-Jawa Tengah ini mempertanyakan surat Kemensos Nomor 1877/5.3/PB.01.04/09/2024 tertanggal 3 September 2024 yang berisi pemberitahuan mengenai pendaftaran TKSK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi hanya memberikan kuota kepada 2.615 orang TKSK padahal kebutuhannya sebanyak 6.681 orang TKSK.
4. Para TKSK se-Jawa Tengah ini mengharapkan Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemensos, KemenPANRB dan BKN untuk melakukan migrasi data TKSK yang terdaftar di database BKN instansi daerah ke database BKN dan data Kemensos sebelum proses pendaftaran PPPK agar seluruh TKSK memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendaftar dan diterima di Kemensos.
5. Para TKSK se-Jawa Tengah mengharapkan Komisi VIII DPR RI untuk mendorong Kemensos agar mengakomodir nomenklatur TKSK bagi TKSK yang belum terdaftar dalam data BKN sehingga pelayanan terhadap pemerlu kesejahteraan sosial di setiap kecamatan dapat tetap dilaksanakan dengan baik.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke that curves upwards and ends in a small, stylized flourish.

**H. MARWAN DASOPANG**